

# **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**Ida Bagus Adi Gunawan<sup>1\*</sup>, Dr. Edy Sujana**

Universitas Pendidikan Ganesha,  
Singaraja, Bali, Indonesia

\* [bagus.adi@undiksha.ac.id](mailto:bagus.adi@undiksha.ac.id), [edy.s@undiksha.ac.id](mailto:edy.s@undiksha.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng". Desain studi yang di pakai adalah kuantitatif kausal. Jumlah sampel di studi ini yaitu sejumlah 40 responden, yang diambil oleh teknik "sampling jenuh". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memakai kuesioner serta diuji dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng, (2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng, (3) Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng.

Kata kunci : standar akuntansi, sumber daya manusia , pengendalian intern

## **Abstract**

*This study aims to examine "The Influence of the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Human Resource Competence, and Internal Control on the Quality of Financial Reports for the Government of Buleleng Regency". The study design used is causal quantitative. The number of samples in this study is a number of 40 respondents, who were taken by the technique of "saturated sampling". The data collection method used in this study used a questionnaire and was tested by multiple linear regression analysis. The results showed, (1) Accrual-based government accounting standards had a positive and significant effect on the quality of Buleleng district government financial reports, (2) Human resource competence had a positive and significant effect on the quality of Buleleng district government financial reports, (3) Internal control had a positive effect and significant to the quality of the financial reports of the Buleleng district government.*

*Keyword : accounting standart , human resources , internal control*

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah sangat menarik untuk dikaji, mengingat semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penggunaan basis akrual yaitu: meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan), meningkatkan pengendalian fiskal (manajemen asset), meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja dan transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan belanja (biaya) bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi pada saat transaksi terjadi.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Mulyadi dan Haryoso, 2019).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat, agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik. Menurut Syamsuddin (2014), sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal utama dalam suatu organisasi, dimana dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam strategi pencapaian

tujuan organisasi. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengenai penempatan kerja karyawan. Menurut Mathis dan Jackson (2006) penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Kompetensi ada yang terlihat dan ada yang tersembunyi. Pengetahuan lebih terlihat, dapat dikenali oleh perusahaan untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan. Keterampilan walaupun sebagian dapat terlihat sebagian lagi kurang teridentifikasi, akan tetapi kompetensi tersembunyi berupa kecakapan yang mungkin lebih berharga dapat meningkatkan kinerja. Baihaqi (2016) menyatakan bahwa pemilik atau pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki pengetahuan akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dibandingkan (Andini dan Yusrawati, 2016).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) juga sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai system pengendalian

intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini BPK (Triono dan Dewi, 2020).

Ditinjau dari teori agensi, penerapan pengendalian intern dapat menciptakan lingkungan pelaporan keuangan yang mendukung peningkatan kontrol terhadap potensi perilaku oportunistik aparat pemerintah. Raharjo (2018) menjelaskan tujuan sistem pengendalian intern salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern menjadi salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut. Pengendalian intern yang terintegrasi dalam sistem akuntansi, maka akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas (relevan, andal, tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap). Risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan juga dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan atas informasi laporan keuangan. SPI yang lemah dapat menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pembuatan laporan keuangan daerah, sehingga penyusunan dan penerapan kebijakan menjadi tidak tertib, lemahnya komitmen terhadap kompetensi, tidak optimalnya kegiatan identifikasi risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang tidak

akurat dan tidak tepat waktu. Kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hasil audit yang mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Sulfiana, 2018).

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini BPK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdapat beberapa strata penilaian. Strata tertinggi hasil pemeriksaan berupa opini dari BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2021 dan mendapat penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan setelah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Karena Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai telah menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPKP Bali atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Berikut beberapa point penting yang menjadi pemeriksaan BPK yaitu ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Temuan Pemeriksaann BPK terhadap**  
**Pemerintah Kabupaten Buleleng**

NO	Temuan
1	Belanja perjalanan dinas biasa memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal jadi penyerapan dana kurang efektif.
2	Belanja honorarium tim KDH dan WKDH melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.
3	Pembayaran belanja materai masih menyalahi prosedur yang seharusnya.

(Sumber : BPKP Bali, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu mengenai opini

audit WTP yang diberikan BPK RI selama 8 tahun terakhir. Namun sebenarnya masih ada beberapa temuan yang dicatat oleh BPKP Bali yakni belanja perjalanan dinas biasa memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal jadi penyerapan dana kurang efektif. Sebenarnya Pemkab Buleleng sudah memberikan anggaran belanja perjalanan dinas yang sesuai dengan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) yang diajukan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun ternyata jumlah tersebut melebihi dari belanja modal yang diajukan sehingga dianggap kurang efektif dalam penyerapan anggaran. Berikut akan ditampilkan rincian belanja perjalanan dinas biasa di beberapa SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Buleleng.

**Tabel 2**  
**Anggaran Perjalanan Dinas Biasa**  
**Pemerintah Kabupaten Buleleng**

No	SKPD	PAGU ANGGARAN		
		2020	2021	2022
1	BPKPD	971.956.000	781.729.000	652.825.000
2	BAPPEDA	1.021.528.000	962.854.000	851.695.000
3	SETDA	1.486.563.000	1.256.251.000	1.095.526.000

(Sumber : Pemerintah Kab. Buleleng Data diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa belanja perjalanan dinas biasa dari tiga SKPD yakni BPKPD, BAPPEDA dan SETDA mengalami penurunan pagu anggaran dari tahun ke tahun. Belanja perjalanan dinas luar daerah itu dianggap tidak efektif dan digunakan hanya untuk menghabiskan anggaran. Hal ini terbukti dari dalam satu surat pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah, hanya untuk kegiatan konsultasi saja, yang ikut dalam surat perintah tugas mencapai 8 orang pegawai. Hal ini tentu menghabiskan banyak pagu anggaran belanja perjalanan dinas. Karena banyaknya pagu anggaran belanja perjalanan dinas, hal ini berimbas dengan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih minim, sehingga kurang efektif dalam penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, belanja perjalanan dinas bisa diperkecil dengan cara manajemen baik dari waktu, jumlah orang, biaya konsumsi, maupun jenis transportasi apa yang di gunakan, agar penyerapan anggaran bisa digunakan lebih efektif, dengan tetap memperhatikan tujuan utama dari perjalanan dinas tersebut.

Belanja honorarium tim Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Presiden 33

tahun 2020 yang dilakukan pengaturan adalah batasan jumlah honor tim yang dapat dibayarkan, jumlah anggota dalam kegiatan tim terutama anggota sekretariat tim maksimal 7 orang serta nilai rupiah dibatasi tergantung SK Tim yang dibentuk jika SK Tim Kepala Daerah maka maksimal honor Rp1.500.000 dan SK Sekretaris Daerah maksimal Rp750.000. Hal ini berarti Perpers 33 tahun 2020 tidak membatasi pembentukan tim. Disamping itu Perpres Nomor 22 Tahun 2020 tidak melarang pemberian honor kepada kepala daerah melainkan bisa diberikan honor dengan kriteria pembentuk SK Tim-nya. Jadi yang dibatasi jumlah honor tim yang bisa dibayarkan kepada eselon I ke bawah. Contoh jika SK Kepala Daerah pasti Kepala Daerah jadi pembina atau ketua dengan honor yang diberikan sebesar 1.500.000 (yang paling tinggi). Namun nyatanya dilihat dari SK tim dan SPJ, kepala daerah menerima honor tim lebih dari 1.500.000. Hal ini sudah ditanggulangi dengan pengembalian dana sesuai kelebihan yang diterima. Dan pembayaran belanja materai masih menyalahi prosedur yang seharusnya. Belanja materai dianggap menyalahi prosedur karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai setelah terjadi transaksi dari bendahara. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya

pengawasan dalam prosedur belanja materai.

Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah erat kaitannya dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit pemerintah daerah. walaupun terdapat beberapa catatan atas temuan dari BPK untuk kabupaten buleleng, namun hal tersebut dianggap terbebas dari salah saji laporan keuangan, karena kabupaten buleleng mampu menyajikan laporan keuangannya dengan baik, meskipun masih ada kelemahan untuk dilakukan perbaikan. Sehingga berdasarkan dari temuan BPK RI tersebut akan menjadikan acuan kedepannya untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan internal control, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik lagi untuk Kabupaten Buleleng mampu mempertahankan kualitas laporan keuangannya dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian ini berpedoman dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu dan Kusumawati (2020) dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)". Hasil penelitiannya menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan yang akan saya teliti terdapat pada objek penelitiannya yaitu Kabupaten Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Kusumawati (2020) juga digunakan sebagai acuan dalam penarikan hipotesis dalam penelitian ini. Penelitian ini pula sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020), Chundri, dkk (2023), Eveline (2016), Dariana dan Jonase (2018), Rina (2019), Damayanti (2020), Ayu dan Kusumawati (2020), Hartono dan Ramdany (2020), Nurfauza dan Rahayu (2021), serta penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi, dkk (2022) yang menyatakan

penerapan standar akuntansi berbasis akrua, kualitas SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang diuraikan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG".

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Kusumawati (2020) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eveline (2016) dimana hasil pengujian Hipotesis pertama membuktikan bahwa variable SAP berbasis Akrua berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan BNPB. Dengan demikian dalam penelitian ini Standard Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan, ini berarti Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 akan menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh Organisasi.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wahyuni (2022) yaitu menurut hasil dari uji analisis dengan deskriptif terbukti bahwa kuesioner yang telah disebar kepada pegawai terkait pada bidang keuangan telah valid. Semua pertanyaan yang diberikan kepada pegawai keuangan keseluruhan diisi. Hasil dari analisis diatas menunjukkan bahwa pengimplementasian

standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual memiliki hasil yang positif dengan kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2016) hasil penelitiannya menyatakan nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Dengan demikian, kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang baik, dalam artian SDM keuangan/akuntansi tersebut kompeten, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang pun akan memenuhi karakteristik kualitatif.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Dewi (2020) dimana dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Sehingga dengan demikian apabila kompetensi SDM yang semakin baik dan meningkat maka semakin baik dan meningkat juga kualitas laporan keuangan.

Hasil analisa statistik dari penelitian yang dilakukan oleh Humaniroh (2013) yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa para Pejabat Penatausahaan Kuangan pada SKPD kabupaten Jember mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melakukan tugasnya. Sama halnya dengan nilai rata-rata dari Kualitas Laporan Keuangan yang juga menunjukkan cukup tinggi.

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk (2019) menyatakan hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di PDAM Tirtawening Kota Bandung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Eleonora (2019) dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan faktor akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerintahan Pemerintahan yang Baik.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fathia, dkk (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengertian pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### Metode

Penelitian yang dilakukan dengan explanatory research adalah penelitian yang mengamati hubungan antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan yang difokuskan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari

dan kemudian dicari kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diseluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yakni sejumlah 40 orang PPK. Pada penelitian ini metode sampling yang diambil yakni Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kuisisioner dan studi kepustakaan. Sebelum melakukan survei, instrument atau alat pengumpulan data harus diuji terlebih dahulu memakai uji validitas dan uji reliabilitas (Sugiyono, 2019). Pada

penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda yang dibantu menggunakan Statistical Package Social Science (SPSS). Analisis regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (independent) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel terikat (dependent) (Ghozali, 2011). Regresi linier berganda ini digunakan untuk memproyeksikan dan mencari pengaruh hubungan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan variabel standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern. Metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, (3) analisis regresi linier berganda, (4) analisis koefisien determinasi (5) uji hipotesis. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- X<sub>1</sub> = SAP Berbasis Akrual
- X<sub>2</sub> = Kompetensi SDM
- X<sub>3</sub> = Pengendalian Intern
- β<sub>1</sub> = Koefesien Regresi Variabel SAP Berbasis Akrual
- β<sub>2</sub> = Koefesien Regresi Variabel Kompetensi SDM
- β<sub>3</sub> = Koefesien Regresi Variabel Pengendalian Intern
- α = Konstanta
- ε = Standar error

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan analisis regresi (terlampir) dapat diketahui hasil koefisien regresi dan

tingkat signifikansinya dalam tabel coefficients. Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS 20 yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Hasil uji T hitung**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Ket
	B	Std. Error				
(Constant)	0,983	0,173		9,669	0,000	
X1	0,176	0,070	0,230	2,499	0,017	Signifikan
X2	0,502	0,119	0,426	4,232	0,000	Signifikan

X3            0,347        0,113        0,368        3,083        0,004        Signifikan

Sumber : Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pengujian program SPSS 20 for windows menunjukkan bahwa nilai signifikansi = 0,017 (1,7%) lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05 (5%). Selain itu nilai korelasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar 0,176. Nilai t-hitung juga lebih besar dari nilai t-tabel yang ditetapkan yaitu  $2,499 > 2,021$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu yang menyatakan : "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng" dapat diuji kebenarannya (hipotesis diterima).

Dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai aset dan penyusutan aset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya. Ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh Pemerintah

Kabupaten Buleleng. Namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu sulitnya mengkonversikan perubahan komponen laporan keuangan tersebut sehingga masih sering terjadi keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pengujian program SPSS 20 for Windows menunjukkan bahwa nilai signifikansi = 0,000 (0%) lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05 (5%). Selain itu nilai korelasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar 0,502. Nilai t-hitung juga lebih besar dari nilai t-tabel yang ditetapkan yaitu  $4,232 > 2,021$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu yang menyatakan : "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng" adalah dapat diuji kebenarannya (hipotesis diterima).

Kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah Kabupaten Buleleng sudah tergolong baik, hal ini terlihat dari hasil penelitian secara langsung dilakukan oleh peneliti. Sumber daya yang mengelola keuangan dan laporan keuangan kebanyakan sudah berlatar belakang pendidikan D3 Akuntansi, S1 akuntansi, dan S1 ekonomi serta sudah pernah menjalani pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan laporan keuangan. Hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga peningkatan kualitas laporan keuangan yang menjadi lebih baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian

dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengaruh Pengendalian Intern (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pengujian program SPSS 20 for Windows menunjukkan bahwa nilai signifikansi = 0,004 (0,4%) lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05 (5%). Selain itu nilai korelasi Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar 0,347. Nilai t-hitung juga lebih besar dari nilai t-tabel yang ditetapkan yaitu  $3,083 > 2,021$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu yang menyatakan : "Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng" adalah dapat diuji kebenarannya (hipotesis diterima).

Sistem pengendalian intern dirangkai dalam mencakup seluruh proses instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengelola informasi secara akurat yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan dalam melindungi aset pemerintah terutama dalam penerimaan

kas. Pengendalian internal bagi instansi pemerintah merupakan suatu keharusan bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian instansi pemerintah yang dikelolanya serta model mana yang diadopsi dan wajib diaudit oleh auditor eksternal. Apabila pengendalian intern dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik, maka seluruh pegawai atau sumber daya yang dimiliki SKPD akan berjalan sesuai dengan harapan dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang handal dan informatif. Pengelolaan terhadap keuangan yang terstruktur dan terperinci akan dapat memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan yang disajikan.

Uji simultan (uji-F) digunakan untuk mengetahui ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut significant atau tidak. Dalam analisis ini menggunakan pendekatan probability (Sig). Nilai batas penerimaan dan penolakan berdasarkan taraf kesalahan atau taraf signifikansi ( $\alpha$ ) yaitu 5% (0,05). Nilai yang dibandingkan adalah nilai probability (Sig) hasil pengolahan data dengan program SPSS 20.0 yang diperoleh pada Tabel Anova. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS 20 yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Hasil uji F hitung**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,155	3	7,052	75,326	0,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,370	36	0,094		
	Total	24,525	39			

Sumber : Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel di atas ternyata hasil pengolahan data memiliki nilai signifikansi 0,000 (0%) lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai F-Test juga lebih besar dari F-Tabel yang ditetapkan yakni  $75,326 > 2,840$  (tabel F-Test terlampir). Hal ini berarti secara bersama sama variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) dan Pengendalian Intern (X3)

berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan kata lain, model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas laporan keuangan berdasarkan masukan variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern.

### **Simpulan dan Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipaparkan beberapa hal kesimpulan penting yaitu sebagai berikut : 1) Variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng semakin berkualitas, 2) Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti dengan kompetensi sumber daya manusia yang tinggi maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan 3) Variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti dengan pengendalian intern yang ketat maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan di atas dan berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka ada beberapa saran-saran yang ingin peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Melihat pada penelitian ini diketahui bahwa dari 3 (tiga) hipotesis yang diajukan, ketiga hipotesis tersebut dapat diterima pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan dilihat dari hasil pengujiannya, bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai korelasi yang paling besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi diharapkan pimpinan selalu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pejabat penatausahaan keuangan beserta staf nya agar mampu meningkatkan kompetensinya dalam bekerja, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari salah saji dan terbebas dari temuan-temuan yang dicatat oleh BPKP Bali dan 2) Bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan konsep yang serupa dengan

penelitian ini, hendaknya mampu untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis yang berbeda dan mengkaji ulang penelitian ini di tempat penelitian lain dan diharapkan mampu untuk menggali lebih terkait variabel yang dikaitkan untuk mengukur kualitas laporan keuangan pada instansi dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya juga diharapkan bagi para peneliti berikutnya untuk mengembangkan indikator-indikator yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan.

### **Daftar Rujukan**

- Andini, Dewi Dan Yusrawati. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Kiat* Vol. 26, No. 1, Juni 2016
- Andriani, Putri, Dkk. 2019. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pdam Tirtawening Kota Bandung. *Jurnal Sain Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* Vol 1 No 3 September-Desember 2019.
- Anggreni, Ni Made Mei Dkk. 2018. Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.1, Januari (2018):352-380. *Jurnal Akuntansi* Vol 5 No 1 Oktober 2020
- Animah, Dkk. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Anton. 2010. Menuju teori stewardships manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika* vol 1 No. 2.

- Aswandi, Wahyu. 2019. Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris Pada Organisasi Nirlaba Di Kota Padang). Jurnal.
- Ayu, Putu Cita Dan Kusumawati Ni Putu Ayu. 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). Jurnal Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Pebruari 2020
- Baihaqi, M. 2016. Pengantar Psikologi Kognitif. Pt Refika Aditama
- Chundri, Intan Rizkia, dkk. 2023. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(02), 2023, p.1-6
- Damayanti, Rizka Aisyah. 2020. Analisis Pengaruh Sap Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Opd Kota Semarang Tahun 2020). Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.
- Dariana dan Oktavia. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkalis). Jurnal
- Dewi, I Gusti Ayu Krisna Dan Dewi Putu Eka Dianita Marvilianti. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 11 No. 1 Juni 2020 P-Issn : 2338 6177, E-Issn : 2686-2468.
- Eveline, Franta. 2016. Pengaruh Sap Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sdm, Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas
- Fathia, Nurul, Dkk. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). Pekbis Jurnal, Vol.12, No.1, Maret 2020 : 39 - 54.
- Ferdinand, Augusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi Ilmu Manajemen. Penerbit : Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hartono dan Ramdany. 2020. Pengaruh Sap, Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi, Vol. 9, No. 1, April (2020)

- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Jurnal Akuntansi. Vol.Xi, No.1.
- Humaniroh, Iftitah Dian. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa 2013.
- Idawati, Wiwi Dan Eleonora Lia. 2019. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Keuangan Dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. Equity, Vol. 22, No.2, 2019, 153-172.
- Kuntadi, Cris, dkk. 2022. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. E-ISSN 2686-4924 P-ISSN 2686-5246 Volume 3, Issue 5, Mei 2022
- Kurniawan, Indra Suyoto. 2019. Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jurnal Kinerja 16 (2), 2019 160-165
- Manalu, Greyssela Cronica Dan Novita. 2021. Apakah Sistem Pengendalian Internal Dapat Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi?. Jurnal.
- Marasabessy, Yunita Dan Muslim. 2020. Pengaruh Standar Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderasi. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.
- Mulyadi Dan Haryoso P. 2019. Peranan Sistem Pengendalian Internal Dan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Surakarta. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Vol. 4 No 1 Tahun 2019.
- Nurfauza, Aghnia Dan Rahayu Sri. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Pada Skpd Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020). Jurnal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Permendagri No. 4 Tahun 2008 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah"
- Putra, Septian Asriadi Dan Varina Rara Juniar. 2021. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol. 1, No. 2, Edisi Juli – Desember 2021, Pp.85-98.
- Raharjo, Medy Syari Khalifah Anggari. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

- Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Pemerintah Kota Malang). Jurnal.
- Rahayu, Dhea Putri. 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kab.Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) Volume 01 Nomor 05 Tahun 2020 (Hal: 87-96)
- Ramadhani, Abdul Aziiz. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rina. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Skpd Kabupaten Sambas). Jurnal
- Sanjaya, Achdar. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. UIN Alauddin Makassar
- Santoso, Singgih. 2012. Aplikasi Spss Pada Statistik Multivariat. Jakarta: Penerbit Pt. Elex Media Komputindo.
- Saraswati, I Gusti Ayu Gita Dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2019. “ Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 27.3, Juni:2268-2292.
- Sari, Anita Dan Wahyuni Arnida. 2022. Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dan Kinerja Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi Vol. 7 No 2 April-Juni 2022.
- Sari, Ratna Purnama, Dkk. 2020. Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jramb, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Vol 6 No 1 Mei 2020.
- Septariani, Jumania. 2018. Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (Jiar) Vol. 2 No.1, Desember 2018, 32 – 51
- Shanti, Yunita Kurnia. 2018. Analisis Penerapan Basis Akrua Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.

- Sulfiana. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt Bumi Sarana Beton. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar. Jurnal Akuntansi.
- Susanti, Nonik Dwi Dan Andayani Wuryan. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu).
- Triono, Brm Suryo Dan Dewi Septiana Novita. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21 (1), 2020, 213-220
- Wahida. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Konowe Utara. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Yulanda, Delvina Dan Oktala Rosananda. 2021. Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Seksi Keuangan Polres. Journal Of Management And Bussines (Jomb) Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
- Yusuf, Ahmad, Dkk. 2018. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Sejarah Penerapan Di Beberapa Negara. Seminar Akuntansi Pemerintahan.